

Ikhtisar Webinar
**Tarung Opini Politik
di Media Sosial**



NOTULENSI WEBINAR

TARUNG OPINI POLITIK DI MEDIA SOSIAL

19 Oktober 2021 | 14:00–16:00 WIB

Webinar “Tarung Opini Politik di Media Sosial” dibuka oleh Andi Widjajanto, Koordinator Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) dan dipandu oleh Ratu Dyah Ayu Gendiswardani, Analis Maha Data Politik Media, sebagai moderator. Webinar ini menghadirkan empat pembicara: (1) Diyauddin, Analis Utama Politik Media LAB 45, yang mempresentasikan temuan kajian bertema “Model Jagat Percakapan di Media Sosial”; (2) Ade Armando, pegiat media sosial dan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia; (3) Ismail Fahmi, *Founder of Drone Emprit and Media Kernels Indonesia*, dan (4) Maudy Asmara, pegiat media sosial.

Diyauddin memulai paparan hasil kajian dengan menunjukkan polarisasi *Social Network Analysis* (SNA) yang mengambil data dari Twitter. Twitter merupakan salah satu platform media sosial yang paling menunjukkan adanya perang narasi pada isu-isu politik. Dalam melaksanakan kajiannya, Diyauddin dan timnya melakukan *deep interview*, serta klusterisasi terhadap kelompok-kelompok komunitas dan jejaring untuk memetakan percakapan di sosial media yang kemudian diolah oleh tim *data scientist* menjadi sebuah jagat yang disebut SNA.

Berdasarkan SNA-nya, tarung politik di media sosial pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2021. Sampel sebesar 300 akun terlebih dahulu diambil secara acak dari akun-akun yang aktif memberikan cuitannya pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sampel tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 01 (Jokowi-Ma’ruf Amin) serta nomor 02 (Prabowo-Sandiaga). Setelah itu, posisi dari akun-akun sampel yang aktif di tahun 2021 dianalisis apakah terjadi perubahan. Dari data tersebut, ditemukan bahwa pendukung Jokowi di tahun 2019, tetap menjadi kelompok yang pro dengan pemerintah di 2021. Di sisi lain, kelompok yang dulu berada di pihak Prabowo merupakan kelompok yang kontra terhadap pemerintah di tahun 2021.

Selain pola pada SNA, tarung opini politik juga dapat diamati melalui operasi *trending topic* di Twitter. Metode-metode pola operasi *trending topic* seperti *cyber army*, tagar ganda, *give away*, *fibonacci*, dan tagar yang menumpang masih digunakan sejak 2019

sampai saat ini. Namun, pola dan metode baru yang digunakan saat terjadi operasi *trending topic* di tahun 2021 lebih variatif, yaitu melalui program *followback* dan penggunaan frasa atau *keyword*. Metode tagar "kuntulanak" dan pengoperasian *bot engine* yang ramai pada tahun 2019 sudah tidak digunakan sekarang, namun diperkirakan akan muncul lagi menjelang Pilpres 2024.

Terdapat tiga pola SNA atau jenis jagat yang unik. Pola pertama adalah jagat gema (*echo chamber*), yakni suatu kelompok atau komunitas yang tidak percaya pada informasi yang datang dari luar kelompok tersebut. Kerap kali terjadi operasi *trending topic* dengan kepentingan untuk menyerang kelompok tertentu dan hanya dibicarakan oleh kelompok ini. Ketika ada fenomena seperti ini, pembicaraan tidak terlalu menarik perhatian kelompok-kelompok di luar jagat, jadi dapat dikatakan bahwa kelompok tersebut berisi orang-orang yang sama. Sebagai contoh, jagat gema muncul pada tagar #2021gantipresiden saat kebijakan PPKM berlangsung pada Juli 2021. Kecenderungan dari pemain tagar ini adalah akun-akun yang memang mengkritik kelompok kontra pemerintah dan tidak menarik masyarakat natural untuk ikut memainkan isu politik ini.

Pola kedua adalah jagat tarung, yakni percakapan kelompok atau komunitas yang lebih banyak melakukan aktivitas saling serang dan saling adu argumen, seperti pada jagat polemik kudeta partai Demokrat. Hanya terdapat dua kelompok besar pada jagat ini, yaitu pro-AHY dan pro-KLB. Kedua kelompok ini terlihat saling berinteraksi walaupun membawa narasi dukungan terhadap kelompoknya masing-masing.

Pola ketiga adalah jagat natural, yakni akun-akun yang tidak mau banyak terlibat dalam konteks politik. Sebagai contoh, peringatan HUT ke-76 RI relatif menaraskan hal-hal positif dalam merayakan hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka yang terlibat merupakan akun-akun resmi untuk membagikan promo, hadiah, dan *giveaway*, serta melibatkan *influencer* natural, seperti anggota JKT48.

Ismail Fahmi memberikan tanggapan mengenai penampakan klaster yang digunakan dalam kajian ini. Fenomena klaster pro dan kontra tersebut adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Metodologi yang digunakan LAB 45 sangat menarik karena bukan hanya menyajikan *insight*, tetapi juga membangun metodologi. Hal ini akan sangat menarik akademisi yang ingin mengetahui bagaimana proses analisa dan

bagaimana cara replikasi metode ini apabila alat yang digunakan dapat diakses umum atau terbuka.

Ada dua hal yang diperhatikan ketika melihat data, yaitu penggunaan kata kunci dan penyajiannya dengan SNA. SNA yang dipakai memiliki pengaruh pada interpretasi yang subjektif, sehingga sangat penting untuk dibagikan ke publik mengenai metodologi seperti ini sehingga bisa bersama-sama membahas suatu isu.

Selanjutnya, kajian ini juga dinilai sangat bagus karena dapat mengkonfirmasi adanya praktik-praktik terkait dengan residu Pilpres 2019 hingga kini, khususnya di Twitter. Riset lapangan yang lebih jauh dibutuhkan untuk melihat apakah akun-akun yang konsisten di dalam satu klaster pro dan kontra tersebut disebabkan oleh basis ideologi atau unsur bisnis karena masyarakat tidak tahu siapa yang ada dibalik akun tersebut. Residu Pilpres 2019 itu terjadi sudah lama, tetapi tetap tidak hilang dan diprediksi akan muncul hal yang sama pada Pilpres 2024. Bahkan, residu tersebut akan diperkuat dengan adanya dukungan-dukungan dari para pendukung lama yang ke depannya tidak bisa diprediksi akan mendukung siapa. Hal ini dimungkinkan dengan adanya *demand* karena elektoral, ideologi, dan lain sebagainya.

Ade Armando menanggapi bahwa masyarakat beruntung memiliki platform media sosial yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Tidak penting kita mendukung siapa pun, akan sangat sehat jika media sosial memberikan ruang untuk berbagai cara pandang yang disampaikan secara demokratis. Masalah yang dihadapi sebagian masyarakat di Twitter adalah adanya fenomena akun-akun yang sengaja dibayar dan penggunaan robot untuk menaikkan sebuah pembicaraan agar viral. Masyarakat harus belajar untuk mencari metode yang memungkinkan untuk mulai memilah suatu akun apakah hanya robot atau bukan.

Pertanyaannya kemudian apakah ada korelasi ketika sebuah topik itu diangkat terus-menerus dengan sikap publik mengenai satu partai politik atau komunitas. Masyarakat harus mulai untuk berpikir tentang studi-studi yang lebih “konstruktivis”, di mana *image* dibangun dan bukan hanya *agenda setting*. Hal ini dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana oposisi menggambarkan sebuah isu, hal yang paling ditekankan, kata kunci yang digunakan, serta narasi dan logika yang dibangun. Tidak hanya kuantitatif, namun sangat penting bagi kita untuk memahami tentang interaksi apa yang sedang terjadi, gagasan-gagasan yang menyebar, dan

perdebatannya. Analisa lanjutan dibutuhkan untuk membahas konstruksi dan *image*, yang cenderung kualitatif.

Maudy Asmara mengaku bahwa ia merupakan pendukung Jokowi di tahun 2014, namun banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan janji yang dikampanyekan. Sehingga, saat ini ia beralih menjadi pihak oposisi yang mengkritik kebijakannya. Di masa pandemi ini, masyarakat tidak bisa turun ke jalan melakukan demonstrasi, sehingga Twitter dan media sosial lainnya menjadi salah satu alternatif untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Kelompok kontra pemerintah seperti ini dibutuhkan untuk melawan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Terkait isu BEM UI *The King of Lip Service*, Maudy menyayangkan tanggapan aktivis yang dulu pro-demokrasi dan merasakan krisis tahun 1998 justru mengkritik pernyataan BEM UI. Selanjutnya, mengenai menyelamatkan polemik polarisasi, menurutnya perpecahan pada Pilpres 2014 hanya sebatas perdebatan mengenai kampanye dan tidak ada serangan pribadi. Namun, semakin hari polarisasinya terlihat semakin kuat. Tidak hanya melawan narasi-narasi kebijakan, tetapi juga menyerang personal para calon. Maudy kemudian membuka diskusi dengan pertanyaan apakah ada kemungkinan untuk mengetahui awal kemunculan suatu isu atau bagaimana mengetahui siapa akun pertama yang menyebarkan isu tertentu.

Diyauddin menjawab pertanyaan Maudy mengenai kemunculan isu dan polarisasi di media sosial. Menurutnya, akun yang pertama kali melakukan cuitan tentang isu atau tagar tertentu dan seberapa lama isu dimainkan atau diviralkan dapat ditelusuri. Kajian LAB 45 juga menyimpulkan bahwa polarisasi yang terjadi saat ini merupakan bagian dari residu Pilpres 2019. Hal ini dikarenakan akun-akun *influencer* yang dipantau pemainnya sebagian besar masih sama. Sementara itu, terkait korelasi topik dengan sikap publik, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial dapat mempengaruhi publik. Sebagai contoh, perdebatan-perdebatan yang viral di media sosial bisa jadi diberitakan oleh media daring yang kemudian membentuk opini publik.

Pada sesi tanya-jawab, Gendiswardani menyampaikan beberapa pertanyaan dari kolom komentar di kanal Youtube LAB 45. Pertama, bagaimana sikap kluster natural yang jarang menanggapi isu yang diangkat oleh kelompok pro atau kontra pemerintah? Kedua, mengapa kelompok pro dan kontra pemerintah masih

memainkan pola *cyber army*, walaupun sebagian masyarakat sudah paham dengan adanya pola permainan ini? Ketiga, platform media sosial apa yang akan digunakan dalam melakukan perang opini politik saat Pilpres 2024?

Ismail Fahmi menanggapi bahwa isu-isu yang diangkat kelompok pro dan kontra itu spesifik. Pola dalam komunikasi memiliki pesan dan konstruksi, serta tidak selamanya masyarakat bisa secara netral sepakat dan tertarik dengan isu yang diangkat kedua kelompok. Oleh karena itu, percakapan yang diangkat kelompok pro dan kontra tersebut tidak menarik untuk masyarakat netral ini. Sementara itu, terkait pertanyaan keterlibatan *cyber army*, Maudy beranggapan bahwa kontra narasi memang harus ada pada setiap isu. Alasannya, jika tidak ada yang menolak isu negatif dari pemerintah, maka akan terjadi kegaduhan di masyarakat. Polarisasi akan terus terjadi dan hal ini akan bergantung pada strategi klaster pro pemerintah dan kontra pemerintah. Pada pertanyaan terakhir, seluruh panelis setuju bahwa tarung opini politik pada tahun 2024 akan dilakukan secara *multiplatform* dengan penyesuaian karakter di tiap platform media sosial yang digunakan.



Jl. Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Selasa, 19 Oktober
2021

➔ +62 812 8218 4545

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id